



Tamaulina Br Sembiring¹
 Wafira Bilhusna²
 Dwi Novitria³
 Jessica Siahaan⁴
 Septia Ayu Syabani⁵
 Muhammad Aidil Akbar⁶
 Novi Triana⁷
 Gracelia Simanjuntak⁸
 Nadia Luqhyana Khalwah⁹
 M. Haekal Fajri¹⁰

PERAN BENTUK NEGARA DALAM PENENTUAN SISTEM PEMERINTAHAN

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam konteks ilmu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bentuk negara terhadap struktur dan organisasi pemerintahan, hubungan antara bentuk negara dengan jenis sistem pemerintahan (presidensial, parlementer, atau campuran), serta dampaknya terhadap kestabilan dan efektivitas pemerintahan. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai bentuk negara, seperti negara kesatuan dan federal, serta sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, dengan memberikan contoh dari berbagai negara tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa kombinasi bentuk negara dan sistem pemerintahan memengaruhi keberhasilan suatu negara dalam mencapai cita-citanya.

Kata Kunci: Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan

Abstract

This article discusses the relationship between the form of state and the system of government in the context of state science. This study aims to analyze the influence of the form of state on the structure and organization of government, the relationship between the form of state and the type of government system (presidential, parliamentary, or mixed), and its impact on the stability and effectiveness of government. This article also explores various forms of state, such as unitary and federal states, and systems of government such as presidential, parliamentary, and semi-presidential, by providing examples from various countries. This article concludes that the combination of the form of state and the system of government affects the success of a country in achieving its ideals.

Keywords: Form of State, Form of Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara merupakan istilah yang diambil dari bahasa asing “staat” (Jerman dan Belanda) atau “etat” (Perancis) atau “state” (Inggris) dengan makna tegak dan tetap. Secara harfiahnya, negara adalah organisasi yang terdiri dari beberapa kelompok individu dengan cita-cita dan hidup berdaulat.

Setiap negara di dunia memiliki bentuk yang berbeda-beda dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Bentuk negara sendiri memiliki makna sebuah sistem yang di dalamnya memuat ketetapan atas dasar kesepakatan dari kelompok masyarakat dengan peran masing-masing.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Pembangunan Panca Budi
 email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id, wafirabilhusna@gmail.com, dwinovitria12@gmail.com
 jessikasiahana@gmail.com septiaayusyabani@gmail.com aidilzyn@gmail.com
 triananovi911@gmail.com graceliasimanjuntak435@gmail.com aidilzyn@gmail.com,
 mhaekalfajri63@gmail.com

Adanya bentuk negara diawali saat zaman Yunani kuno hingga berkembang pada zaman modern sekarang ini. Tiga bentuk negara di zaman Yunani kuno terdiri atas Monarki, Demokrasi, dan Oligarki. Perbedaan dari ketiganya terlihat dari jumlah para penguasanya. Sedangkan pada era modern saat ini bentuk negara terbagi menjadi 2 jenis, yakni negara kesatuan dan negara serikat/federal. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sistem Pemerintahan merupakan istilah yang menggambarkan rangkaian institusi politik. Hal ini digunakan sebagai pengorganisasian sebuah negara dalam penegakan kekuasaan berdasarkan komunitas politik. Pengertian ini berlaku untuk pemerintahan yang mampu menegakkan kekuasaan maupun tidak.

Meskipun suatu negara memiliki kualitas penegakan kekuasaan yang kurang baik, bahkan gagal, maka tetap saja mereka memiliki bentuk pemerintahan yang harus diakui. Sehingga bentuk pemerintahan tidak bergantung dari kualitas penegakan kekuasaan.

Bentuk negara & bentuk sistem pemerintahan merupakan dua istilah yang saling terhubung. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain yang bisa mendeskripsikan wujud dari sebuah negara dan masyarakat dengan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapainya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang relevan.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana bentuk negara mempengaruhi atau menentukan sistem pemerintahan yang diterapkan di suatu negara. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis Pengaruh Bentuk Negara terhadap Struktur dan Organisasi Pemerintahan
- b. Menentukan Hubungan antara Bentuk Negara dan Jenis Sistem Pemerintahan (Presidensial, Parlementer, atau Campuran)
- c. Mengidentifikasi Dampak Bentuk Negara Terhadap Kestabilan dan Efektivitas Pemerintahan
- d. Menganalisis Perbedaan Sistem Pemerintahan di Negara dengan Bentuk Negara yang Berbeda
- e. Memberikan Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi Konstitusional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan hal fundamental bagi setiap warga negara. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk memahami struktur dan mekanisme di balik pengoperasian negara, serta peran kita sebagai individu dalam sistem tersebut. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Sebelum bentuk Negara modern seperti sekarang ini terdapat bentuk negara pada zaman Yunani kuno dan zaman pertengahan.

a. Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno

Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan dan masyarakat masih belum dibedakan, hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali, bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belu sebesar asa sekarang ini. Negara hanya seluas kota saja oleh karena itu pada hakikatnya hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini ada istilahnya yaitu "polis". Selain itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli negara, belu ada perbedaan antara pengertian negara, pengertian masyarakat dan pengertian pemerintahan. Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah: Monarchi, Oligarchi, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk bentuk tersebut diatas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang aka bentuk negaranya Monarchi (bahasa Yunani "monos" berarti "satu" sedangkan "archien" berarti

“memerintah”). Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu Oligarchi (bahasa Yunani “oligai” berarti “beberapa”). Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negaranya disebut Demokrasi (bahasa Yunani “Demos” berarti “rakyat”).

b. Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan

Menurut Duguit, membedakan Negara Republik dengan Kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala Negara, jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut Monarkhi jika kepala negaranya dipilih disebut dengan Republik. Menurut Machiavelli, Negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang/orang tertentu sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang.

c. Bentuk Negara pada Masa Modern Sekarang

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: negara kesatuan (Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi). Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi. Negara Kesatuan, apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Sedangkan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Contohnya, kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan kedalam model ini. Negara Serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negaranegara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara. Disamping 2 bentuk diatas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan ketiga kelompok yaitu: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis yaitu: Monarki absolut, Monarki konstutonal, dan Monarki parlementer. Sedangkan oligarke adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Adapun bentuk pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Bentuk negara dan sistem pemerintahan saling terkait. Negara kesatuan umumnya lebih cocok dengan sistem presidensial, sedangkan negara federal lebih cocok dengan sistem parlementer. Konfederasi biasanya memiliki sistem pemerintahan yang longgar dengan fokus pada kerjasama antar negara anggota. Memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan hal fundamental bagi setiap warga negara. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk memahami struktur dan mekanisme di balik pengoperasian negara, serta peran kita sebagai individu dalam sistem tersebut. Sistem Pemerintahan merujuk pada cara kekuasaan dijalankan dan dipisahkan dalam sebuah negara. Sistem pemerintahan yang umum meliputi sistem presidensial, parlementer, dan campuran. Dalam sistem presidensial, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Contoh sistem presidensial adalah Amerika Serikat. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri yang dipilih oleh legislatif atau parlement, dan kepala negara adalah posisi terpisah, seringkali berupa monarki konstutusal atau presiden seremonial. Contoh sistem parlementer adalah Inggris dan Jepang. Sistem campuran menggabungkan 5 elemen dari kedua

sistem ini, seperti dalam sistem semi-presidensial di Prancis, di mana presiden dan perdana menteri berbagi kekuasaan eksekutif. Sistem pemerintahan merujuk pada cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa sistem pemerintahan yang umum:

- a. Sistem Presidensial Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala Sistem Semipresidensial pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Contoh negara dengan sistem presidensial adalah Indonesia (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945).
- b. Sistem Parlementer Pada sistem parlementer, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri memimpin kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang berasal dari parlemen. Contoh negara dengan sistem parlementer adalah Inggris.
- c. Sistem semipresidensial menggabungkan elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Presiden sebagai kepala negara memiliki beberapa kekuasaan eksekutif, sedangkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara dengan sistem semipresidensial adalah Prancis.
- d. Tetapi ada beberapa negara dengan kombinasi bentuk negara dan sistem pemerintahan, contohnya: Negara Kesatuan dengan Sistem Presidensial: Indonesia, Brasil, Meksiko.
- e. Negara Federal dengan Sistem Parlementer: India, Kanada, Australia.
- f. Negara Kesatuan dengan Sistem Semipresidensial: Prancis, Rusia, Korsel.

SIMPULAN

Memahami bentuk negara dan sistem pemerintahan sangat penting untuk memahami bagaimana suatu negara dijalankan. Pengetahuan ini dapat membantu kita untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara, serta untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung.

SARAN

Indonesia menganut sistem Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Maka dari itu peran pemerintahan sangat penting untuk Negara ini. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih kritis untuk mengawasi pemerintahan yang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemantri, S. (2008). Ilmu Negara: Kajian Bentuk dan Sistem Pemerintahan. Bandung: Alumni
- Hague, R., & Harrop, M. (2013). Comparative Government and Politics: An Introduction (9th ed.). London: Palgrave Macmillan
- Haryono, B. (2003). Ilmu Negara. Jakarta: Rineka Cipta